



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

11 - 12 Juli 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12 / 07 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 11 Juli 2022 https://money.kompas.com/read/2022/07/11/094200626/pekerja-informal-bisa-dapat-rumah-dengan-kpr-ini-syarat-dan-cara-pengajuannya?page=all Pekerja Informal Bisa Dapat Rumah dengan KPR, Ini Syarat dan Cara Pengajuannya Corporate Secretary BTN Ari Kurniaman PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pekerja informal atau pekerja lepas. Selama ini pekerja informal kerap kesulitan mendapatkan fasilitas KPR karena syarat pengajuan KPR umumnya harus menyertakan slip gaji. Sementara, pekerja informal atau lepas biasanya tidak memiliki ikatan kerja pada satu perusahaan dalam jangka waktu tertentu.	+
2.	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 11 Juli 2022 https://m.medcom.id/properti/news-properti/0kp5GdEK-bantuan-subsidi-rumah-flpp-paling-banyak-dinikmati-milenial-usia-26-30-tahun Bantuan Subsidi Rumah FLPP Paling Banyak Dinikmati Milenial Usia 26-30 Tahun BP Tapera Adi Setianto Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp11,27 triliun untuk 101.492 unit rumah. Angka tersebut 44,91 persen dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Penerima manfaat dana FLPP ini untuk kuartal II-2022, tertinggi diterima oleh usia 26 hingga 30 tahun sebanyak 33.249 unit. Selanjutnya diikuti usia 19 hingga 25 tahun sebanyak 30.536 unit. Kemudian usia 31 hingga 35 tahun sebanyak 17.273 unit, jenjang usia 36 hingga 40 tahun sebanyak 10.413 unit dan sisanya di atas 40 tahun sebanyak 8.086 unit. Sementara itu, penerima dana FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta sebanyak 93.010 orang, PNS sebanyak 4.011 orang dan TNI/Polri sebanyak 2.536 orang.	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12 / 07 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 11 Juli 2022 https://www.merdeka.com/uang/menteri-pupr-ongkos-perbaiki-jakarta-lebih-mahal-dibanding-bikin-ibu-kota-baru.html Menteri PUPR: Ongkos Perbaiki Jakarta Lebih Mahal Dibanding Bikin Ibu Kota Baru Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengakui bahwa daya dukung DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sudah tak mungkin lagi dikembangkan. Menurut dia, ongkos memperbaiki Jakarta akan lebih memakan biaya banyak dibandingkan membuat ibu kota baru. Masalah yang dihadapi Jakarta bukan hanya soal banjir. Basuki menyebut air sungai di Jakarta berpotensi tidak bisa mengalir ke laut karena terjadinya penurunan tanah.	+
4	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 11 Juli 2022 https://regional.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-targetkan-bendungan-beringin-sila-ntb-rampung-di-akhir-2022 Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Beringin Sila NTB Rampung di Akhir 2022 Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram, Hendra Ahyadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus membangun bendungan di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu Bendungan Beringin Sila di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangunan dilakukan dalam dua paket dimana Paket I dilaksanakan oleh PT Abipraya - Mina (KSO), sedangkan Paket II oleh PT Nindya – Lestari (KSO) dan supervisi dilaksanakan oleh PT Indra Karya – Bina – Tuah (KSO). Konstruksi Bendungan Beringin Sila didesain dengan tinggi 70,5 m, panjang 787,58 m, dan lebar puncak 12 m.	+
5	TANGGAL	Senin, 11 Juli 2022	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12 / 07 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

MEDIA	https://www.idxchannel.com/economics/rei-sebut-formula-rent-to-own-solusi-masalah-pembiayaan-perumahan/all	+
JUDUL	REI Sebut Formula Rent to Own Solusi Masalah Pembiayaan Perumahan	
NARASUMBER	Ketua Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida	
RESUME	Ketua Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan salah satu penyebab tingginya <i>backlog perumahan</i> saat ini yaitu akses keuangan kepada perbankan. Untuk mengatasinya, REI menginisiasi formula <i>rent to own</i> . Formula tersebut masih digarap bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan perbankan. Dia berharap formula tersebut menjadi jalan keluar dari masalah pembiayaan hingga <i>backlog</i> perumahan.	



11 / 07 / 2022

Sumber: [kompas.com](https://www.kompas.com)

Pekerja Informal Bisa Dapat Rumah dengan KPR, Ini Syarat dan Cara Pengajuannya

Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu
Editor: Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pekerja informal atau pekerja lepas.

Selama ini pekerja informal kerap kesulitan mendapatkan fasilitas KPR karena syarat pengajuan KPR umumnya harus menyertakan slip gaji.

Sementara, pekerja informal atau lepas biasanya tidak memiliki ikatan kerja pada satu perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Corporate Secretary BTN Ari Kurniaman mengatakan, BTN memfasilitasi KPR untuk pekerja informal melalui KPR subsidi dan non-subsidi.

"Bank BTN dapat memfasilitasi kredit KPR Subsidi dan Non Subsidi untuk debitur dari sektor informal," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/7/2022).

Dia merincikan, untuk KPR subsidi pekerja lepas dapat mengaksesnya melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program BP2BT menasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti pekerja informal. Dalam program ini MBR

akan memperoleh bantuan uang muka rumah subsidi sampai dengan Rp 40 juta.

"Sesuai dengan segmentasi debitur yang ditetapkan PUPR di tahun 2022 ini, MBR utk sektor informal dapat memanfaatkan produk KPR Subsidi BP2BT," ucapnya.

Selain itu, pekerja informal juga dapat memanfaatkan fasilitas KPR non-subsidi dengan diklasifikasikan dalam segmen non-fixed income. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja informal.

"Tentunya terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terutama dalam pembuktian penghasilan debitur tersebut," kata Ari.

Dia pun mengungkapkan syarat permohonan KPR BP2BT untuk pekerja informal, sebagai berikut:

- Belum pernah memiliki rumah
- Belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari Pemerintah.
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Memiliki Akta Nikah untuk pasangan suami istri.
- Memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.



11 / 07 / 2022

Sumber: Kompas.com

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Mempunyai penghasilan dengan batasan Rp 6,5 juta untuk rumah tapak dan Rp 8,5 juta untuk rumah susun.
- Telah menabung di Bank selama 3 bulan dengan batasan minimal saldo pada saat pengajuan sebesar Rp 2-5 juta tapi tergantung pada besar penghasilan.
- Uang muka yang harus disiapkan untuk mendapatkan KPR rumah subsidi mulai dari 1 persen dari harga jual rumah.

Setelah melengkapi persyaratan di atas, pekerja informal dapat melakukan pengajuan dengan mendatangi kantor cabang Bank BTN terdekat dengan membawa KTP, NPWP, dan KK asli dan dokumen persyaratan di atas.

Dia menambahkan, BTN sedang menjajaki kerjasama dengan provider digital di bidang ini agar bisa menyediakan informasi digital untuk pengganti slip gaji bagi pekerja informal.

Untuk itu, dia menyarankan agar pekerja informal tetap memiliki perencanaan keuangan sederhana dan menabung di lembaga yang memiliki catatan digital yang baik.

"Dengan transaksi basis digital, maka akan membantu membangun rekam jejak keuangan yang baik," tuturnya.

<https://money.kompas.com/read/2022/07/11/094200626/pekerja-informal-bisa-dapat-rumah-dengan-kpr-ini-syarat-dan-cara-pengajuannya?page=all>



11 / 07 / 2022

Sumber: medcom.id

Bantuan Subsidi Rumah FLPP Paling Banyak Dinikmati Milenial Usia 26-30 Tahun

Author: Rizkie Fauzian

Jakarta: Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp11,27 triliun untuk 101.492 unit rumah. Angka tersebut 44,91 persen dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ([BP Tapera](#)).

Penerima manfaat dana FLPP ini untuk kuartal II-2022, tertinggi diterima oleh usia 26 hingga 30 tahun sebanyak 33.249 unit. Selanjutnya diikuti usia 19 hingga 25 tahun sebanyak 30.536 unit.

Kemudian usia 31 hingga 35 tahun sebanyak 17.273 unit, jenjang usia 36 hingga 40 tahun sebanyak 10.413 unit dan sisanya di atas 40 tahun sebanyak 8.086 unit.

Sementara itu, penerima dana FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta sebanyak 93.010 orang, PNS sebanyak 4.011 orang dan TNI/Polri sebanyak 2.536 orang.

Dari bank penyalur, lima bank tertinggi dari sisi penyaluran adalah BTN baik konvensional maupun Syariah sebanyak 65.882 unit, diikuti oleh BNI sebanyak 9.311 unit, BRI sebanyak 8.831 unit dan BJB sebanyak 4.290 unit serta BSI sebanyak 3.157.

Jika dilihat dari penyaluran dana FLPP untuk kuartal II-2022 melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tercatat realisasi FLPP per 30 Juni 2022 sebanyak

99.557 unit senilai Rp11,06 triliun atau 44,05 persen dari target 2022.

"Semester I-2022 kami ditargetkan untuk [menyalurkan dana FLPP](#) sebanyak 41 persen dari 226 ribu unit. Telah tersalurkan 44,05 persen dari target yang ditetapkan," kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto dikutip dari laman resmi BP Tapera, Senin, 11 Juli 2022.

BP Tapera tidak saja hanya memastikan penyaluran dana FLPP dapat memenuhi target yang ditetapkan, melainkan kualitas bangunan dari hunian yang dibangun oleh para pengembang juga menjadi perhatian khusus.

"Kami masih optimistis untuk kuartal III-2022 target sebesar 68 persen dari 226 ribu unit akan dapat disalurkan dengan baik," jelasnya.

Dengan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang telah ada saat ini, BP Tapera akan menggandeng pihak ketiga dalam hal proses verifikasi unsur / komponen bangunan yang diajukan oleh para pengembang.

"Saat ini kami terus berkomunikasi dengan Dirjen [Pembiayaan](#) Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DJPI Kementerian PUPR) dalam segi teknis pelaksanaan untuk menjaga kualitas bangunan rumah subsidi. Kita harapkan



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

11 / 07 / 2022

| Sumber: medcom.id

bersama dalam waktu dekat atau di tahun ini sudah dapat direalisasikan," ujarnya.

<https://m.medcom.id/properti/news-properti/0kp5GdEK-bantuan-subsidi-rumah-flpp-paling-banyak-dinikmati-milenial-usia-26-30-tahun>



11 / 07 / 2022

Sumber: merdeka.com

Menteri PUPR: Ongkos Perbaiki Jakarta Lebih Mahal Dibanding Bikin Ibu Kota Baru

Reporter: Lisza

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengakui bahwa daya dukung DKI [Jakarta](#) sebagai ibu kota negara, sudah tak mungkin lagi dikembangkan. Menurut dia, ongkos memperbaiki Jakarta akan lebih memakan biaya banyak dibandingkan membuat ibu kota baru.

"Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal (dari pada) kalau kita bikin (ibu kota) baru," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7).

Dia menuturkan, masalah yang dihadapi Jakarta bukan hanya soal banjir. Basuki menyebut air sungai di Jakarta berpotensi tidak bisa mengalir ke laut karena terjadinya penurunan tanah.

"13 Sungai berdasarkan data dan model yang kami buat, 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalir gravitasi ke laut, kecuali kalau kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi karena penurunan tanah. Sudah sering dibahas," jelasnya.

"Jadi saya dari kementerian PUPR dan eselon 1 bersepakat untuk itu, bukan enggak ada neopolitis, enggak ada apa-apa," sambung Basuki.

Sementara itu, pemerintah akan menekan kontrak land development pembangunan IKN pada 15 Juli 2022. Dengan begitu,

pemerintah akan mulai membangun sejumlah infrastruktur di kawasan inti IKN

"Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu di sayembarakan terus ada beberapa modifikasi kan, itu dari situ. Sudah ada yang mana Istana (Presiden) di mana, sumbu kebangsaan, empat Menko di mana, Setneg di mana, itu sudah ada," tutur Basuki.

Anggaran Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau [Jokowi](#) mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).

Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN juga akan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-



11 / 07 / 2022

Sumber: merdeka.com

skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya.

Demi Pemerataan Ekonomi

Jokowi menekankan pemindahan IKN dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dia berharap pemindahan IKN dapat mengurangi beban yang ada di Pulau Jawa.

"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa. Sehingga, beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyelesaikannya. Untuk itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pemindahan IKN.

"Ini sekali lagi pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, **TNI**, Polri dan seluruh komponen bangsa ini," pungkask dia.

<https://www.merdeka.com/uang/menteri-pupr-ongkos-perbaiki-jakarta-lebih-mahal-dibanding-bikin-ibu-kota-baru.html>



11 / 07 / 2022

Sumber: kontan.co.id

Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Beringin Sila NTB Rampung di Akhir 2022

Reporter: Vendy Yhulia Susanto

Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus membangun bendungan di berbagai wilayah.

Salah satunya yaitu Bendungan Beringin Sila di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram, Hendra Ahyadi mengatakan, pembangunan Bendungan Beringin Sila dilakukan sejak Januari 2019 dengan biaya sebesar Rp 1,721 triliun.

"Saat ini progres fisik pembangunannya mencapai 82,20% dan ditargetkan rampung pada Desember 2022," kata Hendra dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/7).

Pembangunan dilakukan dalam dua paket dimana Paket I dilaksanakan oleh PT Abipraya - Mina (KSO), sedangkan Paket II oleh PT Nindya – Lestari (KSO) dan supervisi dilaksanakan oleh PT Indra Karya – Bina – Tuah (KSO).

Konstruksi Bendungan Beringin Sila didesain dengan tinggi 70,5 m, panjang 787,58 m, dan lebar puncak 12 m.

Dengan total kapasitas tampungan 27,46 juta m³ dan luas genangan 126 Ha,

bendungan ini nantinya akan mampu mengairi lahan seluas 3.500 Ha dan menghasilkan air baku sebesar 76 liter/detik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, kehadiran bendungan ini juga memberikan manfaat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) sebesar 1,4 MW, reduksi banjir sebesar 90,37 m³/detik, serta potensi sebagai tempat pariwisata, perikanan tangkap, dan tempat konservasi.

Sebagai informasi, Bendungan Beringin Sila merupakan salah satu dari 6 bendungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di NTB.

Di samping Bendungan Beringin Sila, lima bendungan lainnya yakni Bendungan Tanju, Bendungan Mila, Bendungan Meninting, Bendungan Bintang Bano, dan Bendungan Tiu Suntuk.

Pembangunan Bendungan Beringin Sila bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan irigasi dan air baku khususnya di wilayah Kecamatan Utan dan Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.

<https://regional.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-targetkan-bendungan-beringin-sila-ntb-rampung-di-akhir-2022>



11 / 07 / 2022

Sumber: idxchannel.com

REI Sebut Formula Rent to Own Solusi Masalah Pembiayaan Perumahan

Author: Iqbal Dwi Purnama

IDXChannel - Ketua Real Estate Indonesia (**REI**) Paulus Totok Lusida mengatakan salah satu penyebab tingginya *backlog perumahan* saat ini yaitu akses keuangan kepada perbankan. Untuk mengatasinya, REI menginisiasi formula *rent to own*.

Menurut Totok, formula tersebut masih digarap bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan perbankan. Dia berharap formula tersebut menjadi jalan keluar dari masalah pembiayaan hingga *backlog* perumahan.

"Kemampuan masalah dari *bankable* yang ada selama ini bisa terpecahkan, dan dia bisa membeli rumah," ujar Totok kepada *MNC Portal*, Senin (11/7/2022).

Lebih lanjut, dia mengatakan harga rumah memang terus meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga material dan juga inflasi yang meningkat.

Melalui sistem *rent to own* nantinya, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah untuk memiliki rumah. Sebab mereka bisa bisa membayar harga sewa sambil membayar angsuran rumah yang bakal dibantu oleh perusahaan tempat bekerja.

Misalnya seseorang ingin membeli rumah seharga Rp1 miliar dengan gaji per bulan Rp15 juta. Sedangkan syarat

dari perbankan untuk mengajukan cicilan maksimal 1/3 dari gaji, sehingga orang itu hanya bisa mencicil dengan harga Rp5 juta per bulan. Sedangkan untuk memiliki rumah tersebut paling tidak angsurannya minimal Rp10 juta.

Hal itu yang menurut Totok tidak *bankable*, jika hanya memiliki kemampuan mencicil rumah dengan harga Rp5 juta per bulan. Sedangkan melalui formula *rent to own*, nantinya perusahaan dari pekerja yang mengajukan untuk pembelian rumah bakal dilibatkan.

"Nah (angsuran) itu nanti dibagi, misal dia mempunyai di Rp3 juta, nah yang Rp7 juta perusahaan yang meng-*cover*, nanti setelah 10 tahun ketika ada bunga khusus dari bank, dia *ngangsur* lagi," kata Totok.

Namun demikian hal tersebut nantinya melalui kesepakatan bersama antara karyawan dan perusahaan tempat bekerja yang akan membantu cicilan tersebut. Berapa jumlah yang akan dibayar, baik itu karyawan yang mengajukan, dan perusahaan yang membantu.

"Kenapa tidak dari awal (tidak sewa) kalau dari awal kemampuannya tidak ada, tidak *bankable* (gajinya), nantinya (setelah selesai sewa) sisanya dia mencicil sendiri, karena sudah masuk gajinya secara rupiah, karena



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

11 / 07 / 2022

| Sumber: idxchannel.com

angsuran propertinya tetap, sedangkan
gajinya sudah naik, jadi memang diatur
supaya bisa maju," pungkasnya

[https://www.idxchannel.com/economics/re
i-sebut-formula-rent-to-own-solusi-
masalah-pembiayaan-perumahan/all](https://www.idxchannel.com/economics/re-i-sebut-formula-rent-to-own-solusi-masalah-pembiayaan-perumahan/all)